

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pernyataan tersebut diperjelas dengan pendapat Aristoteles yang menjelaskan bahwa manusia merupakan *zoon politicon*, yang berarti bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu sama lain, dan saling membutuhkan untuk melengkapi berbagai kebutuhannya. Kebutuhan tersebut berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan guna kelangsungan hidup sehari – hari. Oleh karena itu, dengan bermacam – macam dan berbagai jenis kebutuhan tersebut, maka setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Salah satu caranya yaitu dengan melakukan jual beli.

Jual Beli merupakan suatu perjanjian timbal balik, yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya dapat disingkat sebagai KUH Perdata). Menurut KUH Perdata dalam Pasal 1457, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan atas penjualan tersebut. Jadi, dapat ditegaskan bahwa perjanjian jual beli

¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi- Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 43.

merupakan perjanjian timbal balik yang artinya masing – masing pihak antara penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban.

Suatu hal yang dikatakan jual beli tentu tidak lepas dengan syarat sahnya. Jika syarat sah perjanjian jual beli tidak tercukupi, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan perjanjian jual beli. Jual beli memiliki beberapa syarat, seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Apabila syarat – syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian yang di sahkan dengan benar. Ketika salah satu pihak mengingkari atau tidak memenuhi kewajiban dari perjanjian yang telah dibuat, maka pihak tersebut dinyatakan sebagai wanprestasi.

Praktik Jual Beli yang telah diatur dalam KUH Perdata banyak terjadi di kehidupan sehari – hari, khususnya masyarakat di Kabupaten Kudus. Di dalam kehidupan kesehariannya, masyarakat tidak lepas dari peralatan elektronik. Biasanya, jual beli peralatan elektronik tersebut dilakukan antara pembeli dengan penjual melalui toko, pameran elektronik, antar pedagang elektronik maupun melalui media sosial. Saat ini, salah satu jenis peralatan elektronik yang diminati oleh masyarakat adalah komputer. Di era serba digital saat ini, komputer atau

computer banyak digunakan karena dapat membantu menyelesaikan tugas – tugas atau pekerjaan dengan cepat dan efisien.

Perkembangan komputer tidak terlepas dari pengertiannya. Menurut Robert H. Blissmer dalam I Dwi Cahyo, komputer adalah suatu alat yang mampu melakukan tugas seperti menerima, memproses input sesuai dengan programnya dan menyimpan perintah – perintah dan hasil dari pengolahannya, menyediakan output dalam bentuk informasi. Selanjutnya, menurut Fouri dalam I Dwi Cahyo, komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia.²

Di Kabupaten Kudus terdapat hampir 21 toko yang melayani dalam jual beli komputer. Menurut Indra, salah satu pemilik toko komputer menjelaskan bahwa banyaknya toko komputer di kabupaten Kudus karena tingginya permintaan akan komputer, aksesoris dan komponennya, ditambah lagi dengan harga yang lebih ekonomis dan kualitas yang bagus. Bahkan masyarakat dari dalam kota maupun luar kota (Jepara, Demak, Pati dan Rembang) sering menjadi langganan dalam jual – beli komputer di kabupaten Kudus.³

² I Dwi Cahyo, “*Komputer Dan Perkembangannya*”, http://eprints.undip.ac.id/19511/1/Pokok_bahasan_1_Pengantar_Komputer_dan_Perkembangannya.pdf, 21 September 2018.

³ Indra, “*Wawancara Pribadi*”, Salah satu pemilik toko komputer di Kabupaten Kudus, 17 September 2018.

Di dunia perdagangan terdapat 2 (dua) jenis istilah komputer, yaitu komputer dengan merk *branded* (merk terkenal) dan komputer rakitan (komputer lokal). Kedua jenis komputer tersebut memiliki perbedaan dalam perdagangannya, perjanjian jual beli dan aspek – aspek perlindungan hukumnya, khususnya perlindungan untuk para pihak yaitu konsumen yang membeli komputer dan produsen yang merakit komputer tersebut atas permintaan konsumen. Komputer dengan merk *branded* memiliki kualitas yang lebih terjamin, khususnya dalam hal spesifikasi hardwarenya karena sebelum dirangkai oleh pabrik, komputer harus diuji dengan berbagai macam tes. Selain itu, pabrik (produsen) komputer *branded* memberikan jaminan garansinya atas produk yang dibuatnya antara satu sampai tiga tahun. Oleh karena itu, konsumen akan membeli komputer yang utuh dan memiliki kualitas terjamin.

Jenis komputer yang kedua, lebih dikenal dengan nama komputer rakitan. Komputer rakitan merupakan komputer yang komponen dan aksesorisnya dirakit oleh penjual atas kehendak pribadi maupun atas permintaan konsumen. Konsumen dapat memesan komputer dengan komponen yang berbeda dari bawaannya dan meminta penjual untuk merakit komputer tersebut. Jika komputer tersebut dirakit oleh penjual, maka hal itu berarti komputer yang dirakit tidak melalui proses pengujian sesuai standar. Selain itu, penjual komputer rakitan hanya memberikan jaminan garansi toko atas produk yang dibuatnya antara satu sampai tiga minggu. Sehingga komputer rakitan memiliki kualitas yang kurang terjamin. Seringkali dalam jual beli komputer rakitan, konsumen tidak mengetahui spesifikasi pasti dari

komponen komputer rakitan. Hal ini memungkinkan adanya pemasangan komponen komputer yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan jika ada penjual/perakit komputer yang “nakal”. Bisa jadi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, penjual “nakal” memasangkan barang bekas dalam komputer rakitan tanpa memberitahukan apapun kepada konsumen. Tidak adanya jaminan yang pasti, membuat konsumen kurang terlindungi.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu hak konsumen yang harus dipenuhi terdapat pada Pasal 4 Huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Berdasarkan pengertian Pasal tersebut, yang dimaksud kondisi serta jaminan yang dijanjikan adalah konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau produk dalam kondisi yang baik sesuai dengan perjanjian dengan penjual tanpa terdapat cacat tersembunyi. Apabila konsumen mendapatkan produk yang memiliki cacat tersembunyi, maka hal itu berarti pelaku usaha melanggar ketentuan pasal tersebut.

Menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penjual sebagai pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan atau memperjual belikan barang yang rusak, cacat atau bekas tanpa memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai produk yang dijual.

Penjelasan selanjutnya, pada Pasal 9 Ayat (1) huruf f Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa, Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa barang yang diperjualkan oleh penjual tidak boleh terdapat cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi dalam hal ini ada dua, yakni cacat yang telah diketahui penjual namun tidak memberi tahu konsumen dan cacat yang tidak ketahui oleh penjual (cacat yang berasal dari pabrik). Jika penjual telah mengetahui adanya cacat pada barang namun tidak menjelaskan kepada konsumen, maka dalam hal ini penjual sudah menciderai perjanjian jual beli.

Terkadang, konsumen kurang terampil dalam mengoperasikan komputernya, dan mengakibatkan kerusakan yang semestinya tidak terjadi, sehingga dalam hal ini sulit untuk mengetahui kerusakan itu timbul akibat dari kesalahan pemakaian konsumen atau kerusakan dari komponen komputer sendiri. Jika penjual sudah benar – benar merakit komputer sesuai prosedur dan apa yang telah diperjanjikan maka permasalahan itu dapat membuat konflik antara pembeli (konsumen) dan penjual. Oleh karena itu, jika konsumen yang memiliki itikad tidak baik akan membuat alasan untuk mengembalikan barang yang telah dirakit oleh penjual. Untuk itu, penjual dalam hal ini akan dirugikan dan perlu dilindungi.

Hal itu sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa, Pelaku usaha memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Komputer rakitan yang sering beredar dalam masyarakat biasanya ialah komputer pribadi atau *personal computer* (PC). Saat ini, PC rakitan menjadi pilihan berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan orang lebih menyesuaikan spesifikasi sesuai dengan kebutuhannya sendiri jika memakai PC rakitan. Selain itu harganya juga cenderung lebih murah daripada komputer *built-up branded* (Buatan Pabrik).⁴ Tingginya permintaan PC rakitan membuat banyak potensi timbulnya berbagai kasus. Kasus tersebut dapat merugikan penjual maupun pembeli, sehingga diperlukannya perlindungan hukum bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal tersebut memberikan landasan konstitusional bagi para pihak untuk mendapatkan perlindungan yang setara, karena warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

⁴ Liputan 6, "Komputer Rakitan Dongkrak Industri PC Tanah Air", <https://www.liputan6.com/tekno/read/2185945/komputer-rakitan-dongkrak-industri-pc-tanah-air>, 21 September 2018.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “**Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Personal Computer* (PC) Rakitan Di Kabupaten Kudus**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraian diatas, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli *personal computer* (PC) rakitan di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *personal computer* (PC) rakitan di Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimanakah cara aman dalam melakukan perjanjian jual beli *personal computer* (PC) rakitan di Kabupaten Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian *personal computer* (PC) rakitan di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *Personal Computer* (PC) rakitan di Kabupaten Kudus.

3. Untuk mengetahui cara aman melakukan jual beli *Personal Computer* (PC) rakitan di Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *personal computer* (PC) rakitan di Kabupaten Kudus, diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya mengenai perlindungan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *personal computer* (PC) rakitan di Kabupaten Kudus.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada :

- a) Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli khususnya, dan cara agar dapat melaksanakan jual beli yang aman.

- b) Instansi terkait dan praktisi hukum, untuk memberikan masukan mengenai pemikiran dalam hal perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli.
- c) Mahasiswa Hukum, memberikan masukan serta bahan perbandingan bagi mahasiswa hukum yang tertarik untuk mendalami hal – hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum, khususnya hak-hak yang terdapat dalam Peraturan Perundang – Undangan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSATAKA

Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum mengenai perjanjian jual beli dan Tinjauan Umum PC Rakitan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian yang akan dipaparkan, yang berupa metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV : Menjelaskan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang kajian penelitian perlindungan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *personal computer* (pc) rakitan di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka analisis yang dituangkan di dalam BAB II, sehingga akan jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.